



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	<i>Courtesy Call</i>
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 11 Februari 2026
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Tamu Pimpinan BKSAP Nusantara III lt. 2
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Turkiye untuk Indonesia;2. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Dr. Syahrul Aidi Maazat / Ketua BKSAP DPR RI (F-PKS)
Sekretaris Rapat	:	Reny Amir SH., M. (F-PKS) / M., MLI / Kepala Bagian Set. KSB
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">1. Y.M. Mr. Prof. Talip Kucukcan / Duta Besar Turkiye untuk RI2. Ms. Ayse Duran / Third Secretary, Kedutaan Besar Turkiye untuk Indonesia3. Rijal Al Huda, M.Ec. / Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional4. Fajri Ramadhan, S.E., M.E., M.A. / Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Kerja Sama Bilateral5. Nida Nidyarti Rubini / Tenaga Ahli BKSAP;

I. Pendahuluan

Ketua BKSAP DPR RI menerima kedatangan Duta Besar Turkiye untuk Indonesia di Ruang Tamu, Pimpinan BKSAP DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta pada pukul 14.00 WIB dan pertemuan terbuka untuk umum.

II. Kesimpulan / Keputusan

1. Ketua BKSAP DPR RI menyambut baik maksud dan tujuan kedatangan Duta Besar Turkiye serta menegaskan akan melanjutkan kerja sama dengan DPR RI dan Turkiye sebagaimana dilakukan oleh Ketua BKSAP sebelumnya. Kerjasama antara Turkiye dengan DPR RI telah dilakukan terutama dengan Komisi I DPR RI

2. Kepala Negara Indonesia dan Kepala Negara Turkiye cukup bersahabat sehingga menggambarkan kuatnya hubungan Indonesia dan Turkiye. Terkait ini DPR RI siap untuk memfasilitasi hubungan antara Turkiye dengan Indonesia
3. Duta Besar Turkiye menekankan bahwa telah bekerja sama dengan baik dengan Ketua BKSAP terdahulu Bapak Mardani Ali Sera dan berkomitmen meneruskan kerja sama yang baik tersebut. Kerja sama yang akan diperkuat dalam hal ekonomi, militer, diplomasi, dan lain-lain. Turkiye dapat mendukung penempatan pasukan Indonesia di Gaza melalui dukungan logistik.
4. Duta Besar Turkiye menyambut baik uluran tangan Ketua BKSAP untuk memfasilitasi diplomasi mengingat besarnya antusiasme beberapa Perusahaan di Turkiye untuk berinvestasi di Indonesia.
5. Disampaikan pula bahwa Turkiye dapat menginisiasi forum Anggota Parlemen Muda antara Indonesia dan Turkiye. Selain Anggota Parlemen Muda, forum Parlemen Perempuan dapat menjadi wadah kerja sama antara Indonesia dan Turkiye.
6. Salah satu hal yang menjadi penghubung emosional Turkiye dengan Indonesia adalah adanya bukti bahwa Kesultanan Ottoman telah menjalin komunikasi dengan Kerajaan-Kerajaan di Indonesia antara lain Aceh dan Mataram/Yogyakarta.
7. Ketua BKSAP DPR RI menyampaikan bahwa banyak kesamaan secara Indonesia dan Turkiye dalam hal agama dan budaya, dan Isu spesifik adalah perjanjian antara Indonesia dan Turkiye yang masih perlu percepatan dalam proses ratifikasi. Terdapat sekitar 60 perjanjian yang perlu ditindaklanjuti. Isu lainnya adalah repatriasi terdakwa terutama Fethullah Gullen Organization yang juga beroperasi di Indonesia.
8. Turkiye telah membuat *Maarif Foundation* yang bergerak di bidang pendidikan. Diharapkan sekolah yang berada di bawah Fethullah Gullen, bisa dialihkan ke Maarif Foundation. Di Indonesia terdapat 17 sekolah yang terafiliasi Fethullah Gullen.
9. Kedutaan Besar Turkiye di Jakarta telah menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri untuk menutup sekolah tertentu yang berafiliasi terhadap Fethullah Gullen. Di Turkiye sendiri, awalnya tidak diketahui bahwa ada upaya dari Fethullah Gullen untuk mengkudeta Pemerintah Turkiye yang sah.
10. Disampaikan Informasi dari Konjen Istanbul terdapat peningkatan pernikahan antara WNI dan Warga Negara Turkiye. Namun untuk pernikahan antara perempuan Indonesia dan laki-laki Turkiye, masih dilakukan secara tidak tercatat sehingga berimpilikasi pada status ilegal di Indonesia. Di Turkiye, pernikahan dilakukan di Kantor Pernikahan Sipil atau secara keagamaan oleh Mufti. Namun pencatatan selain Pernikahan Sipil dan Mufti, sering dianggap tidak legal. Proses edukasi menjadi hal yang dilakukan karena sulit untuk memberikan pembatasan.

11. Dubes Talip menyampaikan buku sejarah hubungan Indonesia dan Turkiye yang disusun oleh Pemerintah Turkiye.

III. Penutup

Rapat diakhiri pukul 14.45 WIB dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama.

Jakarta, 11 Februari 2026

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris Rapat,



Reny Amir, S.H., M.M., MLI

197305121992032001